

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Rino Adibowo, Sylvia Octa Putri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia,
E-mail :aq_reno@yahoo.com ; sylvia_op@yahoo.com

Abstract

The implementation of e-government has become the agenda of the Government of Bandung since 2001. The use of e-government at the local government had perceived benefits in achieving good governance that is effective, efficient, transparency and accountability. The performance of government in serving the public are becoming more frequent and satisfying. Along with the development of globalization, the actor in international relations is no longer only the state but all components of society can become actors of international relations is no exception local / city governments. The role of the city government as a subnational actors increasingly driven and focused on the ability of the international cooperation undertaken by local / city governments such as sister city cooperation. Paradiplomasi capacity refers to a concept foreign policy run by local / city governments as a sub-state entity for a specific purpose in the realm of international relations. Sister city cooperation is one of the paradiplomasi practices undertaken by the Government of Bandung. This study aims to assess and analyze an idea of how e-government implementation in Bandung City Government in paradiplomasi activities. Thus Bandung City Government can develop policy strategies in the implementation and use of e-government more comprehensively

Keywords : E-Government, Paradiplomasi, Sister City, Cooperation, Bandung

Abstrak

Penerapan e-government telah menjadi agenda Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2001. Pemanfaatan e-government sendiri di Pemerintah Kota telah dirasakan manfaatnya dalam mewujudkan *good governance* yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas. Kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi semakin meningkat dan memuaskan. Seiring dengan perkembangan globalisasi, aktor dalam hubungan internasional bukan lagi hanya negara akan tetapi semua komponen masyarakat dapat menjadi aktor hubungan internasional tidak terkecuali pemerintah daerah/kota. Peran pemerintah kota sebagai aktor subnasional semakin didorong dan dititikberatkan pada kemampuan dalam menjalin kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kota seperti kerjasama *sister city* (kota kembar). Paradiplomasi merujuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah daerah/kota sebagai entitas sub-negara untuk tujuan tertentu dalam ranah hubungan internasional. Kerjasama *sister city* merupakan salah satu dari praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa gambaran bagaimana penerapan e-government di pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun strategi kebijakan dalam penerapan maupun pemanfaatan e-government secara lebih komprehensif

Kata kunci : E-Government, Paradiplomasi, Sister City, Kerjasama, Bandung

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan peluang baru bagi Pemerintah dengan memanfaatkannya dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga dicapainya efisiensi, efektivitas, transparansi

dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintah yang kemudian mengarah pada terwujudnya perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikenal sebagai *Electronic Government* atau E-Government.

Diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi daerah, mendorong setiap daerah untuk berupaya meningkatkan citra, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya kualitas pelayanan publiknya. Penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintah dinilai dapat meningkatkan performa kinerja Aparatur Pemerintah. Pembuatan situs/web Pemerintah Daerah merupakan langkah awal dalam pengembangan konsep E-Government. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders* (pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, swasta) dapat memperoleh informasi, berinteraksi dan melakukan transaksi/pelayanan publik dapat lebih cepat, efektif, dan efisien. Penggunaan ICT dalam sektor pemerintahan inilah yang kemudian menghasilkan hubungan-hubungan baru yang dikenal sebagai ruang lingkup e-Government seperti G2C (*government to citizen*), G2B (*government to business*), G2G (*government to government*), dan G2E (*government to employees*).

Kota Bandung telah mengembangkan E-Government sejak tahun 2001 dengan adanya www.bandung.go.id yang merupakan gerbang Kota Bandung bagi masyarakat global melalui internet. Dalam penerapannya tentulah tidak mudah dan murah, namun keseriusan kota Bandung dalam menerapkan E-Government hingga saat ini telah menunjukkan sejumlah hasil. Infrastruktur fasilitas pemerintahan serta pelayanan publik berbasis internet telah berkembang dengan baik di Kota Bandung.

Dalam perkembangannya, dibawah kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, Kota Bandung semakin memperjuangkan citranya sebagai *Smart City*, dan ini dibuktikan dengan masuknya Bandung dalam nominasi World Smart City Award 2015 yang diselenggarakan di Barcelona. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi *Smart City* diantaranya Pembentukan Dewan *Smart City*, Bandung *Command Center*, perbaikan fasilitas internet di Instansi/SKPD Pemerintah Kota Bandung, mewajibkan seluruh SKPD, Camat, Lurah di Bandung untuk memiliki akun

twitter, penerapan e-government dengan mengusung konsep *Open Government*, *e-procurement*, *e-payment*, *update* harga pasar, *panic button*, *media social mapping*, dengan melibatkan banyak pihak yang diajak untuk menjalin kerjasama secara intensif di berbagai sektor.

Melihat perkembangan yang telah dilakukan oleh Kota Bandung maka membuka peluang besar bagi Bandung meningkatkan daya tawarnya dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak tak terkecuali dengan Pemerintah Kota di negara lain. Dalam kajian Diplomasi dalam studi Hubungan Internasional kewenangan daerah untuk melakukan kerja sama luar negeri disebut Paradiplomasi.

Di Indonesia, Paradiplomasi didukung dengan adanya suatu kebijakan yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kebijakan tersebut sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Paradiplomasi. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membahas tentang perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, sejak memasuki era Desentralisasi terdapat kewenangan daerah otonom untuk melakukan sebagian kerja sama luar negeri. Hal ini terdapat dalam Pasal 42 ayat (1), bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain *sister city/province*, Pemerintah Daerah juga dapat membuat perjanjian kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan/ Undang-Undang menjadi landasan hukum pelaksanaan Paradiplomasi.

Kota Bandung telah mengadakan hubungan kerjasama *Sister City* sejak tahun 1960 dengan Kota Braunschweig, Jerman, sehingga menjadi kota pertama sekaligus Kota terlama dalam penyelenggaraan kerjasama

Sister City di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, Kota Bandung memperluas jalinan hubungan kerjasama dengan kota-kota lain di Luar Negeri seperti Kota Forth Worth – Texas, Amerika Serikat; Kota Suwon, Republik Korea; Yingkou dan Liuzhou, Republik Rakyat Tiongkok, Petaling Jaya, Malaysia. Melalui konsep sister city maka Kota Bandung dapat memiliki peluang untuk berkembang dan berinteraksi lebih luas dengan masyarakat Dunia Internasional di berbagai bidang.

Latar belakang tersebut mendorong tim peneliti untuk membuat penelitian berjudul **Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung**

1.2. Rumusan Masalah

Penerapan E-Government dalam kerjasama sister city Kota Bandung dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan yang dapat diberikan dalam hubungan kemitraan antar Pemerintah Kota dalam pertukaran informasi, prospek kerjasama bidang ekonomi dan budaya yang efektif, efisien dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana Penerapan E-Government dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung, berkenaan dengan strategi kebijakan dalam pemanfaatan *e-government* dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Electronic Government

E-Government adalah penggunaan ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Terdapat 4 (empat) tipe relasi dari E-Government yaitu :

- 1) *Government to Citizen* (G-to-C), Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).
- 2) *Government to Business* (G-to-B), relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis yang bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, yang juga dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.
- 3) *Government to Government* (G-to-G), Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air; Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya; Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal); Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.

4) *Government to Employee* (G-to-E), diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

2.2. Paradiplomasi

Istilah Paradiplomasi mulai diperkenalkan oleh Soldatos Panayotis, dan kemudian dikembangkan oleh Ivo Duchacek dalam *Perforated Sovereignities Towards a Typology of New Actors In International Relations dalam Federalism and International Relations : The Role of Sub-national Units*, Paradiplomasi dilakukan oleh pemerintah sub-nasional disuatu Negara dengan Pemerintah sub-nasional di Negara lain, baik wilayah sub-nasional maupun kedua wilayah Negara tersebut tidak berbatasan (Duchacek, 1999:68)

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan Pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan Luar Negeri, karena Pemerintah Daerah merupakan bentuk yang nyata dari Implementasi Kebijakan Publik (Michaelmann, 2009 :177).

Kemudian menurut pendapat ahli yang lain bahwa Paradiplomasi merupakan salah satu sumber kekuatan nasional, dalam pelaksanaannya merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi subnasional, regional dan lokal guna untuk mencapai tujuannya. Dalam era globalisasi fenomena ini begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non-Negara dalam arena Hubungan Internasional, daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi dan berbagai potensi kerjasama yang melewati batas yuridiksi Negara (Darmayanti, 2011:2).

Paradiplomasi tidak berusaha mewakili kepentingan Nasional suatu Negara secara umum dan luas namun lebih ditujukan pada

masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan Negara dan berada dalam pengawasan Negara. Paradiplomasi merupakan Diplomasi regional yang berada dibawah kedaulatan Negara yang dalam mekanismenya menjadikan aktor Negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut (Keating, 2000:2). Paradiplomasi merupakan pengembangan dari adanya Hubungan Luar Negeri secara langsung yang dilakukan oleh aktor subnasional, yang mempunyai tujuan tertentu dalam berbagai bidang yang ditujukan untuk kesejahteraan daerah yang dinaungi Pemerintah subnasional tersebut dibawah pengawasan Pemerintah Nasional dalam rangka menghadapi globalisasi (Ravenheill, 1999:134)

Motivasi terkuat yang melatarbelakangi munculnya keinginan daerah untuk melakukan kegiatan Diplomasi adalah faktor ekonomi. Tujuan daerah untuk melakukan Paradiplomasi dalam hal ini adalah untuk menarik investasi asing, menarik perusahaan multinasional ke wilayahnya, dan menargetkan pasar ekspor baru. Fungsinya tertuju semata untuk berkompetisi di tingkat global, sehingga tidak memiliki faktor politik sama sekali. Hans Michelmann menjelaskan faktor pendorong paradiplomasi yang meliputi:

- 1) Dorongan dan upaya-upaya segmentasi baik atas dasar objektif antara lain perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di Negara tempat unit subnasional tersebut berada, maupun atas dasar persepsi yang meskipun terkait dengan dasar objektif namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik;
- 2) Adanya ketidakseimbangan dan keterwakilan unit-unit subnasional serta pada unit nasional dalam Hubungan Luar Negeri;
- 3) Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit subnasional mampu mendorong Pemerintah subnasional untuk mengembangkan perannya;

- 4) Kegiatan Paradiplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala internasional yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub-nasionalnya;
- 5) Adanya kesenjangan institusional dalam perumusan kebijakan Hubungan Luar Negeri dan *Inefisiensi* pelaksanaan Hubungan Luar Negeri pada Pemerintahan Nasional;
- 6) Masalah-masalah yang terkait dengan *Nation Building* dan konstitusional juga dapat mendorong Pemerintah sub nasional melakukan Paradiplomasi;
- 7) Domestikasi Politik Luar Negeri sebagai dampak dari mengemukakan isu-isu *low politic* telah memotivasi Pemerintah subnasional yang memiliki kepentingan dan kompetensi konstitusional untuk melakukan Paradiplomasi.

2.3. Kerjasama Sister City

Sister City atau Kota Kembar merupakan hubungan kemitraan yang terjalin dalam konteks hubungan antar Kota dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu serta menganut prinsip perlakuan sama. Dalam buku dokumen *Sister City* Kota Bandung dijelaskan bahwa *Sister City* adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan Kota disuatu Negara dengan Kota di Negara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan yang erat dan saling menguntungkan, *Sister City* dapat meningkatkan *volume* kerjasama dengan perkembangan di berbagai bidang kerjasama yang dianggap perlu bagi kesejahteraan masyarakat disuatu Kota (Pemerintah Kota Bandung).

Kerjasama *Sister City* terbagi kedalam Kerjasama Budaya, Akademik, pertukaran Informasi dan Ekonomi. Kerjasama Budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya. Kerjasama akademik melibatkan pengiriman Duta atau Delegasi maupun kerjasama Akademik. Pertukaran

informasi dilakukan dalam mendorong kerjasama dan pembangunan di kedua Kota tersebut. Kerjasama Ekonomi merupakan bidang terpenting dalam kerjasama *Sister City* dengan tujuan meningkatkan perdagangan antar Kota. (Souder dan Brede1, 2005:4)

3. Objek dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini tim peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana penerapan E-Government dalam Kerjasama *Sister City* sebagai praktik paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian akan diperolehnya informasi dan data yang relevan untuk menjawab sejauh mana pemanfaatan egovernment oleh Pemerintah Kota Bandung dalam praktik paradiplomasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, dimana menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data secara simultan seperti :

- (i) Studi Pustaka
Studi Pustaka dilakukan mengingat tersedianya informasi dan data dalam jumlah besar mengenai penerapan e-government di pemerintah daerah dan juga penerapan egovernment di Pemerintah Kota Bandung khususnya. Hal ini dapat ditelusuri melalui berbagai informasi dalam buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari artikel dan berita melalui situs/website di internet.
- (ii) Dokumentasi
Teknik ini digunakan untuk menganalisa sumber informasi yang tersedia dari dokumen-dokumen resmi seperti dokumen kebijakan dan regulasi yang berkenaan penerapan egovernment, kerjasama sister city dan sebagainya.
- (iii) Rekam Jejak.
Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan menganalisa rekam jejak dan informasi terutama yang berkaitan dengan penerapan egovernment di Pemerintah Kota Bandung dan

kerjasama sister city sebagai praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung seperti awal mula penerapan e-government dan kerjasama sister city dilakukan, tahap-tahap implementasi e-government dan kerjasama sister city, sejak kapan pemanfaatan e-government dalam upaya meningkatkan kerjasama sister city.

(iv) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam dari informan sebagai pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas berkenaan dengan penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Penerapan Model *G to G* dalam Aktivitas Paradiplomasi Kota Bandung

Didalam Penerapan E-Government, Kota Bandung dapat memanfaatkan model *G to G* dalam aktivitas paradiplomasi dalam berinteraksi dengan Pemerintah Kota mitra *sister city* melalui situs/[websiteportal.bandung.go.id](http://portal.bandung.go.id) guna membuka peluang dan kerjasama dalam berbagai bidang. Pembuatan *page* mitra *sister city* beserta dengan informasinya sehingga kerjasama yang terjalin dapat menjadi informasi yang mudah diakses oleh banyak pihak termasuk masyarakat internasional.

Berdasarkan pengamatan dan temuan tim peneliti, pada portal.bandung.go.id belum tersedianya *fitur/page* khusus yang berkenaan dengan aktivitas paradiplomasi Kota Bandung secara khusus. Dalam hal kerjasama Apabila menggunakan *tool search* maka informasi mengenai sister city akan diperoleh dalam bentuk artikel. Sebagai pembanding kita dapat melihat contoh seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Suwon, Korea Selatan yang membuat *page* khusus mitra *sister city* berikut dengan informasi dan potensi Bandung dalam bidang investasi dan kerjasama.¹ Selain itu pada portal Kota Braunschweig juga tersedia

page khusus Twin Cities, dengan motto “*There are friends all over the world for you!*” yang menampilkan profil mitra *sister cities* kota Braunschweig, termasuk di dalamnya profil Kota Bandung beserta informasi kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua Kota dan *contact person* dari pihak Pemerintah Kota Bandung yang dapat dihubungi.² Mitra *sister city* Bandung lainnya yaitu Forth Worth, Negara bagian Texas, Amerika Serikat memiliki laman khusus Forth Worth Sister Cities International dengan motto *Connecting Globally, Thriving Locally*.³ Pada laman utama terdapat Bendera Indonesia dan Bandung sebagai mitra *sister city* Forth Worth. Informasi tentang Kota Bandung dapat diperoleh melalui profil, kegiatan kerjasama, informasi *travel* dan *sister cities* facebook *page*. Pada situs/website Kota Liuzhou juga terdapat *page* khusus kerjasama *sister cities* yang dilakukan oleh Kota Lizhou dan Kota Bandung.⁴ Pada situs/website Kota Yingkou terdapat *page* khusus *sister cities*, namun informasi tentang Bandung sebagai mitra *sister city* tidak dapat ditemukan.⁵

Pada portal.bandung.go.id juga tidak tersedia pilihan multibahasa seperti Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Penggunaan fitur multibahasa, Misalnya bahasa negara dari mitra Pemerintah Kota *sister city* pada portal.bandung.go.id juga akan mempermudah aksesibilitas informasi tentang Kota Bandung oleh warga negara atau warga kota yang bermitra dengan Kota Bandung.

Dilain pihak, tim peneliti menemukan alamat situs/website di luar situs resmi portal.bandung.go.id yang justru lebih banyak memberikan informasi mengenai aktivitas paradiplomasi Kota Bandung. Alamat situs/website tersebut diperoleh ketika dilakukan *search engine* pada Google dengan

¹Diakses melalui [http://www.suwon.go.kr/sw-
www/www05/www05-01/www05-01-14.jsp#none](http://www.suwon.go.kr/sw-
www/www05/www05-01/www05-01-14.jsp#none)

² Diakses melalui https://www.braunschweig.de/english/city/twincities/partner_freundschaftstaedte_bandung.html

³ Diakses melalui <http://www.fwsistercities.org/>

⁴ Diakses melalui http://english.liuzhou.gov.cn/info/sister/201004/t20100405_370412.htm

⁵ Diakses melalui <http://english.yingkou.net.cn/sistercity.htm>

memasukkan keyword “Sister City Kota Bandung “.Situs/website tersebut adalah <http://bdg.ksln.co.id/>.Situs/website ini merupakan situs/website Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Kota Bandung. Sub bagian ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan kerjasama luar negeri di bawah Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sub bagian ini mempunyai bidang garapan yaitu Fasilitasi Kegiatan Sister City, Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Program City Net Indonesia, Fasilitasi dan Koordinasi dengan Pihak Luar Negeri yang dilakukan SKPD, dan Fasilitasi dan Koordinasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan Pejabat dan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.⁶

Apabila diamati secara situs/website <http://bdg.ksln.co.id/> bersifat legal namun tidak resmi dibandingkan dengan portal.bandung.go.id bila dilihat dari penggunaan domain dari alamat situs/website.Namun situs/website <http://bdg.ksln.co.id/> memberikan informasi lebih banyak tentang kegiatan dan aktivitas paradiplomasi Kota Bandung.Pada situs/website <http://bdg.ksln.co.id/> tersedia pilihan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang dapat diakses oleh siapapun dengan mudah dan tentunya dapat diakses oleh masyarakat internasional yang ingin mengetahui Kota Bandung. Pada situs/website <http://bdg.ksln.co.id/> pengunjung juga dapat mengakses media social @BagKSD_Bdg yang merupakan Akun resmi Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung yang intensitas updating informasinya dapat dikatakan baik.

Tim peneliti menyadari bahwa ketersediaan data dan informasi yang dapat diakses melalui situs/website <http://bdg.ksln.co.id/> merupakan bagian dari tupoksi Sub Kerjasama Luar Negeri terkait. Akan tetapi tim peneliti melihat belum adanya sinkronisasi dan koordinasi terkait informasi yang berkenaan dengan aktivitas

paradiplomasi yang terdapat pada portal.bandung.go.id dan <http://bdg.ksln.co.id/> Ini dapat kita telusuri apabila kita gunakan *tool search* pada portal.bandung.go.id maka ketika kita memasukkan *keyword* “sekretariat daerah” “kerjasama luar negeri “ maka belum ada informasi apapun yang dapat kita akses. Selanjutnya apabila kita mengklik salah satu *page* pada portal.bandung.go.id misalnya pada *page* Sumber Daya Kota dan *sub page* SKPD dan Bidang Urusan maka juga belum ada informasi apapun yang dapat kita akses.

Jika merujuk pada informasi yang disediakan dalam <http://bdg.ksln.co.id/> mengenai tahapan-tahapan dalam kegiatan kerjasama luar negeri seperti sister city sebagai aktivitas paradiplomasi, akan ada beberapa tahap yang akan dilalui diantaranya yaitu tahap peninjauan, penandatanganan Letter of Intent (LoI), penyusunan rencana kerjasama, persetujuan DPRD, permintaan fasilitasi pemerintah, penyusunan draft MOU, penandatanganan MOU, pelaksanaan kerjasama, evaluasi pelaksanaan, pelaporan pelaksanaan kerjasama. Maka tahap awal yang akan dilakukan adalah peninjauan, dimana peninjauan dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan potensi kota yang dimiliki antar kedua pihak. Pertukaran ini dapat memanfaatkan kantor perwakilan negara asing di Indonesia atau kantor perwakilan RI di luar negeri. Pada tahap ini kedua pihak saling memberikan gambaran mengenai kondisi masing - masing kota secara umum. Disamping itu juga dibicarakan mengenai kemungkinan bidang - bidang kerjasama.Misalnya : *good governance*, promosi pariwisata, *sales mission*, seminar, *capacity building* dan sebagainya. Untuk itu proses peninjauan dapat ditunjang melalui penggunaan situs/website pemerintahan dalam rangka tukar-menukar informasi dan potensi kota yang dimiliki. Artinya keberadaan situs/website dalam penerapan e-government dalam model *G to G* dapat dimanfaatkan secara positif dalam aktivitas paradiplomasi.

Dalam pengamatan tim peneliti dalam kerjasama *sister city* sebagai praktik

⁶Diakses melalui <http://bdg.ksln.co.id/>

paradiplomasi Kota Bandung, informasi yang tersedia hanya bersifat memberikan informasi secara umum tentang kerjasama yang sudah dilakukan negara kota mitra, namun tidak memetakan bahwa kemanfaatan apa yang didapat oleh Kota Bandung dengan bekerja sama dengan Kota Bandung. Pencapaian kerjasama dan manfaat yang diperoleh dalam berbagai bidang perlu dirinci dan detail, begitu pula dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung. Diharapkan portal.bandung.go.id kedepannya dapat memiliki informasi yang lengkap dalam kerjasama luar negeri, sehingga menarik pihak pemerintah kota di negara-negara asing untuk bekerjasama dengan Kota Bandung. Untuk itu perlu dibangun kerjasama dan sharing informasi antara pemerintah kota Bandung dan Kedutaan Besar RI di negara kota mitra.

4.2 Model *G to C* dalam Aktivitas Paradiplomasi Kota Bandung

Dalam Penerapan E-Government model *G to C* dilaksanakan oleh pemerintah dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portfolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Selama ini penerapannya dengan memberikan layanan kepada masyarakat secara online sehingga dapat menghemat waktu, efisien dan transparan. Tentu saja pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kota masih dibatasi kepada warganya saja. Berkenaan dengan paradiplomasi ada peluang yang dapat ditangkap dengan penggunaan pola *G to C* ini, dimana definisi “C” dapat dikembangkan secara luas dengan tidak hanya memandang “*citizens*” dari suatu negara atau masyarakat kota, namun juga “*world-citizens*” yaitu masyarakat dunia atau masyarakat internasional. Pelayanan yang diberikan tentu saja berbeda, apalagi yang berkenaan dengan perihal administratif seperti mengurus KTP, SIM, Pajak dsb. Namun pelayanan secara informasi dan interaktif masih dapat diberikan oleh Pemerintah Kota. Wisatawan

mancanegara, masuk dalam kategori “*world citizens*” yang masuk dalam kategori ini.

Dalam berita yang dilansir oleh CNN Indonesia, Kota Bandung merupakan Kota Terfavorit oleh Wisatawan Se-ASEAN. Bandung telah menjadi salah satu destinasi wisata yang dilirik oleh wisatawan mancanegara terutama di ASEAN. Popularitas Bandung semakin meningkat setelah diadakannya Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2015. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandung dapat memberikan layanan informasi mengenai Pariwisata Kota Bandung, misalnya informasi tentang tempat wisata, hotel, restoran/cafe, shopping centre, pusat kesenian dan budaya, tempat pembelian souvenir khas Kota Bandung, termasuk juga link layanan pembelian tiket-tiket wisata secara online, download brosur Wisata Kota Bandung, link aplikasi-aplikasi yang dapat didownload tentang Kota Bandung, begitu juga polling atau testimony wisatawan mancanegara tentang Kota Bandung. Akan tetapi saat ini layanan-layanan informasi ini belum terintegrasi dengan baik. Informasi mengenai pariwisata Kota Bandung dapat diakses melalui bandung tourism.com, sedangkan melalui portal.bandung.go.id informasi yang diperoleh masih berupa artikel dan berita. Ketersediaan informasi dan layanan ini akan mendorong promosi Pariwisata Kota Bandung dan dampak positif bagi ekonomi masyarakat Kota Bandung.

4.3 Model *G to B* dalam Aktivitas Paradiplomasi Kota Bandung

Penerapan Model *G to B* dalam pemerintahan adalah bagaimana sebuah pemerintahan membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kota Bandung saat ini menjadi magnet bagi para investor asing. Dalam melakukan aktivitasnya para investor atau entitas bisnis membutuhkan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. Ketersediaan data dan informasi akan meningkatkan peluang investasi di Kota

Bandung. Iklim investasi, kemudahan dalam melakukan bisnis, kemudahan dalam pengurusan izin, transparansi harus dapat tersosialisasikan dengan baik. Sehingga para investor maupun pelaku bisnis memiliki kepercayaan (*trust*) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Terkait paradiplomasi, Kota Bandung kedepannya dapat menarik investor asing dan membawa dampak positif bagi pembangunan dan ekonomi Kota Bandung

4.4 Model G to E dalam Aktivitas Paradiplomasi Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan tim peneliti dalam model G to E terdapat permasalahan yaitu manajemen aparatur pemerintah Kota Bandung Bandung), *portal.bandung.go.id* belum maksimal praktik paradiplomasi. Sejauh ini Wali Kota Bandung merekrut tenaga profesional non-PNS yang menggunakan biaya operasional Walikota dalam menangani dan menindaklanjuti urusan kerjasama luar negeri. Artinya aktivitas paradiplomasi dalam model G to E *E-Government* Kota Bandung, belum maksimal terlaksana. Dalam konteks paradiplomasi, model G to E ini dapat dikembangkan berupa sistem pengembangan karir pegawai pemerintah dan perbaikan kualitas SDM dalam kerjasama luar negeri dan e-government

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

- 1) Bandung belum memiliki page khusus dalam portal bandung.go.id yang memiliki data dan informasi tentang praktik Paradiplomasi yang dilakukan Kota Bandung, misalnya kerjasama sister city, terutama kota-kota yang telah memiliki kerjasama sister city dengan Bandung. Dilain pihak mitra sister city telah menyediakan page khusus dalam kerjasamanya dengan Kota Bandung.
- 2) Belum tersedianya pilihan multi bahasa pada portal bandung.go.id, Hal ini

menyebabkan informasi mengenai Kota Bandung sulit diakses oleh publik maupun pihak asing.

- 3) Belum terjalannya kerjasama dan *sharing informasi* dalam ranah antara pemerintah kota Bandung dan perwakilan atau Kedutaan Besar RI di negara mitra sister cities. Selain itu belum terlihatnya hasil dan manfaat dari kerjasama sister city antara Pemerintah Kota Bandung dengan kota lainnya yang dapat diakses oleh publik.
- 4) Paradiplomasi melalui Penerapan E-Governancemenggunakan model G to G, G to C, G to B, dan Gto E dapat meningkatkan *bargaining power* Kota Bandung sebagai *smart city*

5.2 Rekomendasi

- 1) Pemerintahan Kota Bandung perlu mensinergikan penerapan E-Government yang sudah berjalan selama ini dalam praktik paradiplomasi sehingga dapat meningkatkan citra kota Bandung di dunia internasional
- 2) Peningkatan kerjasama dengan mitra sister city, begitu juga dengan perwakilan RI di luar negeri atau di negara mitra sister city melalui koordinasi, *sharing data* dan penyediaan informasi secara online agar mudah diakses oleh publik
- 3) Perlunya dikembangkannya konsep *Bandung Cyber-Paradiplomacy* oleh Pemerintah Kota Bandung, dengan mengoptimalisasi dari penerapan E-Government dan Paradiplomasi dalam mempromosikan Kota Bandung dan menarik minat masyarakat internasional terhadap kota Bandung di berbagai bidang.

Daftar Pustaka**Buku**

Michaelmann, Hans dan Soldatos, Panayotis. 1990. *Federalism and International Relations : the Role of Subnational Units*. Oxford : Clarendon Press

Ravenhill, John. *Paradiplomacy in Action, The Foreign Relations of Sub National Governments*

Richardus Eko Indrajit. 2004. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.

Richardus Eko Indrajit. 2005. *E-Government in Action : Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*

Acuan artikel dalam Jurnal

Darmayanti, Christy. 2011. *Transformasi, Potensi Paradiplomasi Dalam mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*. Yogyakarta: Universitas Slamet Riyadi

Keating Michael. 2000. *Going Beyond Paradiplomacy? Adding Historical Institutionalism to Account for Regional Foreign Policy Competence*. Hanover : Forum of Federations an International Federalism

Dokumen

Sister City Bandung : Colorful, Beautiful and Friendly, Pemerintah Kota Bandung.

Karya Ilmiah

Bashar, Akabarizal Alireksa. *Kewenangan Pemerintah Kota Bandung Dalam Menjalankan Kerjasama Sister City Dengan Kota Braunchweigh Tahun 2000-2012*. 2013

Website

<http://www.suwon.go.kr/sw->

www/www05/www05-01/www05-01-14.jsp#none

https://www.braunschweig.de/english/city/twincities/partner_freundschaftsstaedte_bandung.html

<http://www.fwsistercities.org/>

http://english.liuzhou.gov.cn/info/sister/201004/t20100405_370412.htm

<http://english.yingkou.net.cn/sistercity.htm>

<http://bdg.ksln.co.id/>

[http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150210162426-269-](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150210162426-269-31086/survei-bandung-kota-terfavorit-wisatawan-se-asean/)

[31086/survei-bandung-kota-terfavorit-wisatawan-se-asean/](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150210162426-269-31086/survei-bandung-kota-terfavorit-wisatawan-se-asean/)

[http://lib.lmhannas.go.id/public/media/catalog/0010-](http://lib.lmhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011117/swf/2832/files/basic-html/page15.html)

[121500000011117/swf/2832/files/basic-html/page15.html](http://lib.lmhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011117/swf/2832/files/basic-html/page15.html)